

Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen,

Representing Indonesian CSOs, I am delivering a statement compiled by Indonesian CSOs through a consultative process involving CSOs from various SDGs sectors. We are fully committed to advancing the SDGs, both at the global level and in Indonesia.

Regarding Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2025, we appreciate the achievements, but the pace of progress continues to slow down every year. CSOs are concerned about SDG governance, particularly the VNR's focus on reporting achievements rather than addressing the process, data quality, and funding that prioritizes economic growth over economic equity.

The implementation of fair and inclusive development and SDGs must be the top priority in accelerating the SDGs, not only in Indonesia but also internationally and in other multilateral initiatives.

Therefore, CSOs declare the following stance:

1. Substantive civil society participation and recognition of its contributions need to be mainstreamed. We highlight the decline in the quality of VNR consultations and governance, especially following the transition to digital platforms, evidenced by reduced confirmation of input receipt and transparency in the use of CSO data. Data also needs to be strengthened inclusively and integrated across all levels of government, accompanied by data governance audits.
2. Transparency and accountability in managing SDG programs and budgets are crucial elements to ensure the effectiveness and sustainability of SDG programs, while also preventing abuse of power and corruption. Indonesia should also prioritize inclusive and equitable economic distribution, with an emphasis on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through access to training, capital, and protection within more concrete regulations.
3. Inclusivity and gender equality are key levers for achieving the SDGs. Investment in gender equality must be increased for primary and advanced health services supporting sexual and reproductive health rights (SRHR), including the adoption of SDG 5.4, which recognizes unpaid care work. This should be supported by social protection policies strengthened through the Health in All Policies strategy, as well as the implementation of policies ensuring women's affirmative action in development, such as women's representation in parliament and the development process.
4. The issues of migrant workers and human trafficking are absent from the VNR 2025, particularly under Goal 8. We also regret the omission of fisheries workers, including ship crews and processing workers, in Goal 14, which is closely linked to Goal 8. The fisheries sector requires support for climate change adaptation and mitigation, alongside the protection of marine and coastal ecosystems and law enforcement against destructive fishing.

The UN High-Level Political Forum (HLPF) on SDGs in New York is a safe space. Now is the time to accelerate the SDG process, with only five years remaining, beginning with the UN HLPF on SDGs 2025.

Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen

Mewakili CSO Indonesia, saya menyampaikan statement yang disusun oleh CSO Indonesia melalui proses konsultatif CSO dari berbagai sektor tujuan SDGs. Kami berkomitmen penuh memajukan SDGs, baik di tingkat global maupun Indonesia.

Menyikapi VNR Indonesia 2025, kami mengapresiasi capaian, namun kecepatan kemajuan pencapaian terus melambat setiap tahun. Kekhawatiran CSO ada pada tata Kelola SDG seperti focus VNR SDGs lebih kepada laporan capaian ketimbang menyampaikan proses, kualitas data, dan pendanaan yang berpihak kepada pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerataan ekonomi.

Implementasi pembangunan dan SDGs yang adil dan inklusif harus menjadi prioritas utama dalam mempercepat SDGs, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di internasional dan inisiatif multilateral lainnya

Oleh karena itu OMS menyatakan sikap

1. Partisipasi masyarakat sipil yang substantif dan pengakuan atas kontribusinya perlu diarusutamakan. Kami menyoroti penurunan kualitas konsultasi VNR dan tata kelola, khususnya pasca-transisi ke platform digital, seperti menurunnya konfirmasi penerimaan masukan dan transparansi pemanfaatan data dari CSO. Data juga perlu diperkuat secara inklusif dan terintegrasi di seluruh tingkatan pemerintahan disertai audit tata Kelola data.
2. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program dan anggaran SDGs merupakan elemen krusial untuk menjamin efektivitas serta keberlanjutan program SDGs, sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Indonesia juga hendaknya memprioritaskan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, dengan penekanan pada UMKM melalui akses pelatihan, permodalan dan perlindungan dalam regulasi yang lebih konkrit.
3. Inklusivitas dan kesetaraan gender menjadi pengungkit utama pencapaian SDGs. Investasi kesetaraan gender perlu ditingkatkan kepada layanan kesehatan primer dan lanjutan bagi hak kesehatan reproduksi (SRHR), termasuk adopsi SDGs 5.4 yaitu penghargaan unpaid carework disertai kebijakan perlindungan sosial yang dapat diperkuat oleh strategi Health in All Policies, serta pelaksanaan kebijakan kepastian afirmasi perempuan dalam pembangunan seperti keterwakilan perempuan dalam parlemen dan proses Pembangunan.
4. Isu pekerja migran dan perdagangan orang tidak tampil dalam VNR 2025, khususnya pada Tujuan 8. Kami juga menyesalkan tidak disebutkannya isu pekerja perikanan, termasuk awak kapal dan pekerja pengolahan dalam Tujuan 14, yang berhubungan erat dengan Tujuan 8. Sektor nelayan perlu mendapatkan dukungan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim disertai perlindungan ekosistem laut dan pesisir serta penegakan hukum bagi destructive fishing.

UN HLPF SDGs di New York adalah ruang yang aman. Sekaranglah saatnya untuk mempercepat proses SDGs yang menyisakan lima tahun lagi, dimulai dengan UN HLPF SDGs 2025.